
Kegagalan Jokowi Ma'ruf di Aceh Pada Pilpres 2019

Muliawati¹ dan Rizal Fahmi²

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

² Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

(Email korespondensi: muliawati@unsyiah.ac.id)

Abstrak

Selama berkontestasi politik di dua kali ajang Pilpres, Joko Widodo (Jokowi) belum pernah merasakan kemenangan di Propinsi Aceh, adapun kekalahan di Pilpres 2019 memiliki variabel yang berbeda dengan kekalahan pada Pilpres 2014. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pendekatan diantaranya observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor kegagalan Jokowi-Ma'ruf di Aceh pada pilpres 2019. Adapun kegagalan tersebut, pertama, tidak terbendung berita Hoax, kedua, kebijakan pemerintahan Jokowi periode sebelumnya dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat. Ketiga, isu identitas yang selalu dikembangkan oleh lawan Jokowi, keempat, terdapat isu mengenai cerita masa lalu. Kelima, kurang maksimalnya tim pada tingkatan *grass root* di daerah-daerah Kabupaten yang jauh dari pusat ibukota Provinsi, Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan Jokowi di Aceh yang paling kuat adalah berita hoax yang identik dengan isu negatif, hal tersebut menutupi berita positif tentang Jokowi. Sikap masyarakat yang fanatik selalu dimanfaatkan oleh elite politik yang memiliki kepentingan pada pilpres 2019 dan tim Jokowi di Aceh terbukti tidak mampu melawan propaganda lawan yang cukup massif dilapangan.

Kata kunci: Aceh; Hoax; Joko Widodo; Pemilihan Umum

Abstract

During the political contestation in the two Presidential Election events, Joko Widodo (Jokowi) has never felt a victory in Aceh Province, while the defeat in the 2019 Presidential Election had a different variable than the defeat in the 2014 Presidential Election. This study, using qualitative methods with several approaches including field observation, interviews, and literature studies. The results showed that there were several factors of Jokowi-Ma'ruf's failure in Aceh in the 2019 presidential election. As for the failures, first, the Hoax news was unstoppable, secondly, the Jokowi's government policy in the previous period was considered to have no partiality to the people. Third, the issue of identity that has always been developed by Jokowi's opponents, fourth, there is the issue of past stories. Fifth, the team is not maximally working at the grass-root level in the regency areas far from the centre of the provincial capital, Banda Aceh City. This research concludes that the most powerful failure of Jokowi in Aceh is the hoax news which is identical with negative issues, it masked positive news about Jokowi. The fanatical attitude of the community has always been exploited by the political elite who have an interest in the 2019 presidential election and the Jokowi team in Aceh proved unable to counter the massive enemy propaganda in the field.

Keywords: Aceh; Hoax; Joko Widodo; National Election

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 merupakan pertama dalam sejarah Indonesia dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan umum yang bersamaan membuat persaingan antar kontestan semakin lebih panas daripada Pemilihan Umum sebelumnya, secara eksplisit Pemilu serentak termuat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, baik pemilihan Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 222 menyebutkan bahwa “Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Melihat dari penjelasan pasal 222 tersebut pasangan calon Presiden Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin melebihi dari syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yaitu minimal mendapat 20% jumlah kursi di DPR, mengacu pada poin tersebut Jokowi-Ma'ruf Amin di dukung oleh partai politik yang memiliki wakilnya di DPR, seperti partai PDI-P, Golkar, NasDem,

PKB, PPP, Hanura menjadi dukungan mayoritas kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 daripada rivalnya yaitu Prabowo dan Sandi yang hanya didukung oleh empat (4) partai seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN.

Dukungan yang mayoritas dari partai politik sudah memiliki kursi di DPR untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak serta merta mesin partai bisa berjalan diseluruh wilayah di Indonesia, ada beberapa provinsi pasangan calon presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin kalah telak dari rivalnya yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi walaupun dapat dilihat bahwa Aceh merupakan basis suara Prabowo sejak pemilihan presiden tahun 2014.

Kekalahan pasangan Jokowi-Ma'ruf di pengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga target tim sukses mendapat suara mayoritas itu tidak berhasil di raih. Tapi Tim Kampanye Daerah (TKD) menyebutkan tetap optimis meski Aceh merupakan basis Prabowo-Sandi, TKD tak ragu untuk menargetkan kemenangan 70 persen. Palsanya, kampanye juga masif dilakukan oleh koalisi partai pendukung pasangan calon presiden nomor 01 itu (Masriadi, 2019).

Kampanye secara massif yang dilakukan Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak membuahkan hasil yang signifikan, pasalnya suara Jokowi-Ma'ruf di bawah 20%, sangat jauh dari prediksi tim sukses yang menargetkan 70% suara untuk Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu serentak tahun 2019. Kekalahan Jokowi-Ma'ruf sangat berbeda dengan raihan suara pada pemilihan presiden tahun 2014 yang mendapat suara lebih kurang 40%. Beberapa pendapat bermunculan kepublik mengenai kekalahan telak Jokowi-Ma'ruf di Aceh, ada beranggapan bahwa karena isu agama, fitnah, dan isu ekonomi yang selalu digaungkan oleh tim sukses Prabowo-Sandi untuk mengalahkan Jokowi-Ma'ruf di Aceh.

Moeldoko yang menduga, kekalahan Jokowi tersebut lantaran masyarakat disana sudah terpengaruh isu agama yang dihembuskan sejak lama. Moeldoko mengaku mendapat penjelasan dari rekan-rekannya bahwa masyarakat Aceh sangat teguh pendirian apabila telah menyangkut masalah agama. Sehingga, mereka sulit untuk mengubah pilihan politiknya ke Jokowi (Egeham, 2019).

Kegagalan Jokowi-Ma'ruf di Aceh bagian yang tak terhitung oleh tim sukses sejak dari tahun pilpres tahun 2014, sehingga tim Prabowo-Sandi sangat muda

untuk menjatuhkan rivalnya dengan berbagai isu yang membuat pemilih di Aceh enggan untuk memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf pada periode keduanya untuk memimpin Indonesia. Tim sukses bergerak secara massif menjelang pencoblosan dan itu tidak berpengaruh kepada pemilih, pemilih di Aceh tetap mengandalkan Prabowo yang jadi presiden selanjutnya karena dianggap pro kepada ulama dan memperjuangkan hak-hak rakyat miskin, hal ini sudah dikerjakan tim Prabowo sejak tahun 2015 pasca dilantikannya Jokowi-JK menjadi presiden.

Dari penjelasan tersebut tidak serta merta karena hanya satu isu saja, mungkin masih banyak faktor yang menyebabkan kekalahan Jokowi-Ma'ruf di Aceh, bisa Agama, ekonomi, fitnah masalah PKI, sehingga menurut penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegagalan Jokowi-Ma'ruf di Aceh yang sangat jauh perbedaan suara antara Jokowi-Ma'ruf dengan pasangan Prabowo-Sandi, dikaitkan dengan isu-isu yang bisa berdampak negatif kepada Jokowi-Ma'ruf.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti lebih menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu merupakan metode dengan beraneka segi fokus yang meliputi suatu

interpretif, konstruktif, pendekatan naturalistik pada subjeknya (Trumbull & Watson, 2010). Penelitian kualitatif mempelajari sesuatu pada sudut pandang alamiahnya, menerjemahkannya, dan melihat fenomena dalam hal makna yang dipahami manusia. Dengan kata lain penelitian kualitatif dapat mempelajari sisi nyata dunia, menemukan bagaimana orang mengatasi sesuatu dan berkembang dalam situasi tersebut yang menggambarkan kehidupan manusia kontekstual (Yin, 2011). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi studi yang menggunakan dan mengumpulkan beragam studi kasus bahan empiris, pengalaman pribadi, introspektif, ceritera kehidupan, wawancara, observasional, historikal, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan peristiwa rutinitas dan problematis dan makna dari kehidupan individual (Trumbull & Watson, 2010).

Untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis artinya menggambarkan secara umum mengenai berbagai permasalahan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Propaganda Hoax

Penyebaran hoax atau berita bohong, tidak lagi memiliki filter dalam ruang publik apalagi sudah begitu cepat menyebar di dunia maya. Pada era digital ini tidak ada lagi hambatan dalam hal penyebaran informasi apakah informasi tersebut memiliki nilai kebenaran ataupun tidak. Berita hoax ini disebarluaskan sebahagian hanya untuk menaikkan rating media ataupun untuk meningkatkan jumlah *follower* serta ada memang digunakan sengaja untuk maksud tertentu biasanya untuk menyerang pribadi, lawan bisnis bahkan untuk menyerang lawan politik.

Pada tahun 1926, Harold Lasswell menulis disertasinya yang berjudul "*Propaganda Technique in the World War*" yang menyebutkan sejumlah program propaganda yang bervariasi mulai dari konsep sebagai strategi komunikasi politik, psikologi audiens, dan manipulasi simbol yang diambil dari teknis propaganda yang dilakukan oleh Jerman, Inggris, Perancis dan Amerika. Teori Lasswell ini sangat dekat dengan pendekatan penelitian kegagalan Jokowi dalam membendung berita hoax yang begitu massif menyerang Jokowi. Media massa juga sangat memiliki peran penting terhadap penyebaran informasi yang bisa mengubah informasi men-

jadi sebagai konsep strategi komunikasi politik, psikologi audiens, dan manipulasi simbol yang menjadi propaganda.

Pada pilpres 2019 yang lalu, sangat kuat sekali dihadapkan dengan berita-berita hoax yang ditujukan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, beredarnya berita hoax ini tentunya merugikan pihak Jokowi dan Ma'ruf Amin, misalnya beredar Isu mengenai Jokowi sebagai antek-antek yang pro terhadap China, dengan Isu kedatangan besar-besaran penduduk China ke Indonesia. Isu yang berkembang tersebut dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan marwah pemerintah atas kedaulatan dalam berdikari serta keberpihakan terhadap asing.

Sedangkan Ma'ruf Amin beredarnya foto editan memakai baju santa clus yang identik dengan simbol umat Kristen, padahal hal tersebut tidak benar dengan sengaja dilakukan pembunuhan karakter pada Ma'ruf Amin yang diakui salah satu sebagai ulama dan kyai serta salah satu petinggi Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dengan jabatan Rais Am. Tentunya propaganda hoax tersebut untuk menjatuhkan marwah seorang kyai ataupun ulama yang pada kalangan umat Islam dianggap sebagai panutan. Berita hoax yang menyebar tersebut sebahagian masyarakat Aceh mempercayainya dan

terpancing dengan berita bohong tersebut, sehingga banyak dari kalangan masyarakat Aceh enggan untuk memilih Jokowi.

Berita hoax yang begitu masif di Aceh sangat sulit bagi tim pemenangan untuk melakukan *counter-issue* yang dihadapkan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan wawancara dibawah ini:

“Beredarnya berita hoax tidak pada masa pilpres saja, melainkan isu tersebut berkembang sudah 4 tahun sampai pada masa pilpres, berkembangnya isu hoax ini bukan masyarakat Aceh tidak sadar melainkan masyarakat Aceh sadar menerima informasi tersebut. Pengaruh kekalahan Jokowi di Aceh tidak hanya dihadapkan berita hoax semata melainkan Aceh memiliki carapandang berbeda mengenai politik nasional, sehingga secara politik pragmatis selalu dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Selain itu juga pada tahun 2009 Aceh secara politik dianggap cerdas dalam hal politik nasional, karena mampu membaca arah politik nasional siapa yang berpotensi menang seperti kemenangan SBY di Aceh dengan menang mutlak” (Narasumber, Relawan Tim Jokowi-Ma'ruf di Aceh (TKD), Banda Aceh, 23 Maret 2020).

Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat

Kebijakan yang dianggap tidak populis dan dianggap sebagai kebijakan yang memicu masalah seperti kebijakan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan sumber utang luar negeri. Tentunya kebijakan ini sangat membahayakan negara dengan mengingat utang



Indonesia dengan luar negeri cukup membahayakan. Kebijakan yang tidak pro rakyat ini menjadi sebagai bahan pergunjingan di media sosial, perdebatan publik, dan bahan olokan. Kebijakan yang tidak populis ini, membuat Jokowi menjadi bahan kritikan, ejekan dan olokan. Misalnya saja dengan kebijakan pembangunan tol, masyarakat menganggap ini kebijakan hanya menguntungkan pihak yang memiliki uang, sedangkan mereka yang tidak memiliki uang tentunya tidak menggunakan jalan tol, serta tol bukan prioritas karena masih banyak masyarakat mengalami kemiskinan, dan pengangguran.

Melihat kebijakan Jokowi tersebut membuat masyarakat Aceh kurang simpati, karena Jokowi hanya membangun Indonesia ini dengan pembangunan infrastruktur saja akan tetapi mengenai penambahan lahan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan kemiskinan sangat kurang. Apalagi dengan bertambahnya tenaga kerja asing di perusahaan swasta di Indonesia. Hal tersebut tanpa Jokowi tidak pro kepada masyarakat kecil, dikala masyarakat Indonesia membutuhkan pekerjaan sebaliknya mengimpor tenaga kerja asing dari China.

Hal ini juga dapat dilihat tenaga kerja asing yang bekerja di Aceh salah satunya yang ditemukan Sebanyak 51

tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang bekerja pada PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd yang merupakan mitra PT Lafarge Cement Indonesia, Lhoknga, Aceh Besar, kedapatan tidak mengantongi izin bekerja sesuai dengan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Adanya serombongan warga negara asal Cina yang bekerja di Lhoknga diketahui setelah Tim Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh yang dipimpin Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Putut Rananggono didampingi Kepala Seksi PNK-Jamsospa dan Pengawas Ketenagakerjaan, Ichwan beserta dua staf pengawas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan itu, Selasa 15 Januari 2019 (Bakri, 2019).

Dengan ditemukannya TKA kerja asing China di Aceh yang ada dalam pemberitaan, tentunya ini menjadi sebuah isu yang dimainkan oleh pihak lawan maupun yang anti terhadap Jokowi di Aceh. Pada sisi tertentu berita tersebut ada yang untuk memanfaatkan agar pemerintah Jokowi benar-benar dinggap sebagai pro asing. Efek dari pemberitaan tentunya membentuk opini publik yang terkadang oknum tertentu memanfaatkan moment

politik. Efek dari pemberitaan juga mempengaruhi terhadap elektabilitas Jokowi di Aceh.

Pada sisi tertentu mengenai fenomena Jokowi pro China yang menjadi bahan berita, tentunya pemberitaan yang tidak berimbang banyak Jokowi melakukan kerja sama dengan negara-negara luar lain selain China terkadang para pengguna media sosial hanya membidik satu berita saja yang ada kaitannya dengan China seolah-olah Indonesia mitra tunggal China padahal hakikatnya Indonesia dalam politik global mempunyai sikap politik bebas aktif yaitu bebas saja berhubungan dengan negara manapun apakah hubungan bilateral maupun multilateral.

Mengenai pandangan diatas berdasarkan data dilapangan bahwa pemerintahan Jokowi dianggap pro rakyat, dengan kebijakannya yang selama ini dianggap membantu kalangan bawah dan menengah misalnya saja program KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar, Pembangunan Rumah subsidi yang diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai gaji rendah serta dana desa. Program nasional ini sudah berjalan keseluruh Indonesia sampai ke Aceh.

Program Jokowi pro rakyat yang memiliki nilai positif jarang di ekspose bahkan selalu diberitakan dengan informasi

yang tidak benar baik di media maupun media sosial, hal ini disebabkan karena berita hoax sudah mendominasi pada dunia maya dan efek kebencian juga begitu menguat pasca pilpres 2014 yang lalu. Menurut data penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakir mengungkapkan berdasarkan hasil survei lembaganya yang dilakukan tahun 2018, ada tiga daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi. Tiga daerah tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, dan Banten (CNN Indonesia, 2019).

Menurut Amin (2018) tinggi tingkat penerimaan terhadap hoaks terkait bangkitnya komunisme, kriminalisasi ulama, dan masuknya jutaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Selain itu juga, di daerah yang memiliki afiliasi dengan Islam politik, sangat tinggi tingkat penerimaan informasi hoax. Islam politik yang dimaksud adalah memiliki afiliasi dengan Masyumi, sehingga mereka antipati terhadap komunisme dan di daerah yang partai tersebut menang di Pemilu 1955, angka anti-komunisme tinggi seperti Jawa Barat (CNN Indonesia, 2019).

Kekalahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak hanya dihadapkan juga dengan persoalan hoax saja melainkan afiliasi

politik. Hal tersebut dapat dilihat pernyataan sebagai berikut:

“Aceh memiliki kecendrungan yang berbeda dalam pilihan politik cenderung dipengaruhi oleh Masyumi hal ini terlihat agak sulit dimasuki paham-paham politik yang berasaskan nasionalis...” (Narasumber, Relawan Tim Jokowi-Ma’ruf di Aceh (TKD), Banda Aceh, 23 Maret 2020).

Selain berita hoax yang mempengaruhi kekalahan Jokowi-Ma’ruf Amin di Aceh ternyata afiliasi politik di Aceh secara historis yang cenderung terhadap afiliasi politik yang basis agamis, sehingga paham-paham nasionalis sulit untuk mempengaruhi masyarakat Aceh.

Isu Identitas

Pada tataran politik isu identitas merupakan isu yang sangat strategis untuk dikembangkan dalam politik praktis. Politik identitas, secara harfiah dapat diartikan menurut Ubed (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Pada dasarnya politik identitas yang resistensinya cukup tinggi bisa menimbulkan konflik horizontal. Pada pilpres yang lalu masih terasa begitu kuatnya isu identitas yang

dimainkan oleh kedua belah pihak yang bertujuan mendapatkan dukungan suara.

Selain itu juga Heller dan Punsher (1995) mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut (Ubed, 2002).

Menurut Hall dan Du Gay (2006), politik identitas dimaknai sebagai suatu proses yang dibentuk melalui sistem bawah sadar manusia, sistem ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah sosial yang terjadi. Pada pilpres 2019 kemarin Jokowi dan Ma’ruf Amin dihantam dengan politik identitas yang memiliki muatan keagamaan yang begitu kuat. Misalnya

adaanya ormas yang berbasis agama terang-terangan mendukung Prabowo Subianto dan membuat isu-isu yang sangat mengusik bagi petahana melawan isu yang dikembangkan seperti isu dilarangnya azan dan kriminalisasi ulama. Bentuk-bentuk isu yang sensitif tersebut sengaja dikembangkan untuk menghantam Jokowi Maruf Amin. Akan tetapi isu yang dikembangkan ini tidak berhasil karena untuk mengcounter isu tersebut Jokowi juga melakukan pendekatan dengan Ulama-ulama dan Tokoh Ormas Islam juga dirangkul seperti NU. Jika di Aceh isu tersebut termakan oleh masyarakatnya karena Aceh mengenai isu agama sangat sensitif dan masyarakatnya memiliki sifat fanatis yang kuat.

Kegagalan Jokowi di Aceh ini sangat dipengaruhi oleh politik identitas yang dimainkan oleh pihak lawan politik, dengan mempropaganda partai pendukung Jokowi dari partai PDIP, partai PDIP yang berasaskan nasionalis agak sulit diterima oleh orang Aceh apalagi partai tersebut sering memberikan pernyataan politik yang kontra produktif terhadap masalah agama, misalnya saja isu penghapusan mata pelajaran agama disekolah-sekolah, tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan kultur orang Aceh yang pada umumnya yang sangat Islami. Kebijakan Jokowi

selama ini masyarakat Aceh melihat ada pengaruh partai PDIP yang dipandang tidak berpihak umat Islam bahkan merugikan umat Islam misalnya seperti isu kriminalisasi ulama.

Akibatnya, isu agama yang dimainkan oleh pihak lawan untuk mengalahkan Jokowi. Berdasarkan data lapangan mengungkapkan kekalahan Jokowi di Aceh satu-satunya isu identitas berupa agama dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut sudah terbukti dengan keikutsertaan Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam agenda politik Prabowo ternyata mempengaruhi suara Prabowo di Aceh signifikan hal tersebut terungkap pasca Prabowo jumpa Ustadz Abdul Somad (UAS) yang disiarkan di televisi secara live di TV One. Selain itu juga UAS sering *road show* mengisi ceramah-ceramah seluruh Aceh sampai pelosok, tentunya secara tidak langsung komunikasi politik terbangun.

Faktor Historis

Kekalahan Jokowi di Aceh juga dapat dilihat dari perspektif historis. Secara historis Aceh pada umumnya mayoritas penduduknya menganut agama Islam bahkan politik juga dipengaruhi oleh muatan agama. Menurut data lapangan diketahui bahwa Aceh memiliki kecenderungan dalam pilihan politik dipengaruhi oleh

Masyumi hal ini terlihat agak sulit dimasuki faham-faham politik yang berasaskan nasionalis.

Faham politik masyarakat Aceh yang identik Islami ini membentuk sebuah sikap maupun ideologi politik yang sangat mempengaruhi pada setiap kontestasi politik nasional. Misalnya saja pada era tahun Orde Baru Aceh merupakan basis PPP yang notabene partai Islam, tidak pernah partai Golkar dan PDIP berkuasa di Aceh. Jika dianalisis bahwa politik Aceh tidak pernah memiliki irama yang sama dengan politik di pusat ketika orang pada masa orba mendukung partai pemenang tapi Aceh tidak, selalu beda dalam sikap politik. Secara tidak langsung sikap politik di Aceh lebih kepada oposisi secara pragmatis dalam pilihan politik Aceh selalu mengalami dipihak yang tidak menguntungkan karena pada masa Orba tidak ada pembangunan yang ada di Aceh yang hanya di pulau Jawa.

Tidak Maksimalnya Timses

Dalam politik praktis *team work* atau tim sukses sangat menentukan terhadap proses kemenangan. Melihat kondisi pilpres yang lalu tim kerja Jokowi masih tidak maksimal melakukan strateg-strategi kemenangan. Hal tersebut terbukti bahwa pilpres 2019 Aceh kalah telak

Jokowi dengan Prabowo. Jokowi hanya mendapatkna suara 14,41%, sedangkan Prabowo mencapai 85, 59%. Berbeda halnya tahun 2014 yang lalu Jokowi mendapatkan suara 45,61% sedangkan rivalnya Prabowo-Hatta Rajasa 54,39%. Pada tahun 2014 ini tidak begitu telak kekalahan Jokowi. Pada tahun 2014 yang lalu di Aceh banyak pasangan Jokowi-JK menang di tujuh kabupaten/kota, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Simeulue, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Bener Meriah. Suara tertinggi pasangan ini diperoleh di Pidie 93.308 suara, Aceh Tengah 57.882 suara, dan Bener Meriah 41.171 suara (Hasyim, 2014).

Pada tahun 2019 sebaliknya di daerah tersebut Jokowi-Ma'ruf Amin mengalami kekalahan. Kerja tim dalam kampanye hanya lebih terpusat di Ibukota Provinsi yang banyak nampak alat peraga kampanye yang mulai dari baliho, spanduk, banner, dan T Shirt sedangkan di daerah kurang menyebar. Hal ini tentunya mempengaruhi terhadap kerja-kerja relawan di daerah. Sulitnya medan pertarungan politik di Aceh pada masa Pilpres ini juga mengakibatkan tim-tim yang ada di daerah tidak bekerja secara maksimal karena isu berita hoaks yang begitu masif beredar di Aceh. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Ada beberapa di daerah tidak banyak orang yang datang ketika kampanye terbuka, hal ini disebabkan di daerah-daerah tim relawan kurang maksimalnya bekerja.” (Narasumber, Relawan Tim Jokowi-Ma’ruf di Aceh (TKD), Banda Aceh, 23 Maret 2020).

Selain itu juga dapat dilihat tidak ada konstituen di Aceh yang memiliki interest politik terhadap partai pengusung, misalnya saja seperti PDIP di Aceh tidak memiliki kursi sehingga sulit untuk melakukan kerja-kerja politik pemenangan terhadap Jokowi. Selain itu juga Irwansyah ketua Tim Kemenangan Daerah Aceh (TKD) menyebutkan Jokowi dihadapkan kancangannya fitnah dan hoax, hingga kami tidak mampu membendunginya. Selain itu juga pertarungan dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Aceh untuk Pilpres sangat berat, hal itu karena kerja nyata Jokowi selama ini untuk Aceh dikalahkan dengan berbagai fitnah (Fajri, 2019).

KESIMPULAN

Bahwa kegagalan Jokowi di Aceh yang paling kuat berhadapan dengan berita hoax yang identik dengan isu negatif yang sehingga menutupi berita positif tentang program Jokowi. Selain itu juga sikap masyarakat Aceh yang fanatik dimanfaatkan oleh elite politik yang memiliki kepentingan pada pilpres 2019 maupun pileg. Tim relawan Jokowi di Aceh terbukti tidak mampu melawan propaganda

lawan yang cukup massif dilapangan, serta tidak maksimal dalam menjalankan kerja pemenangan dilapangan. Setelah itu, Jokowi masa memerintah dianggap oleh kalangan masyarakat kelas menengah kebawah kebijakannya belum mengarah kepada program kerakyatan akan tetapi kebijakannya lebih mendukung kepada pengusaha-pengusaha.

REFERENSI

- Bakri. (2029). Pekerja Asal Cina Menyalahi Visa. *Serambinews.com*. Diambil dari <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/19/pekerja-asal-cina-menyalahi-visa>, diakses 30 Agustus 2019.
- CNN Indonesia. (2019). LIPI: Jawa Barat, Aceh, dan Banten Tertinggi Informasi Hoaks. *CNN Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190118175011-20-362017/lipi-jawa-barat-aceh-dan-banten-tertinggi-informasi-hoaks>, diakses 30 Agustus 2020.
- Egeham, L. (2019). Moeldoko Sebut Kekalahan Jokowi di Jabar dan Aceh karena Serangan Isu Agama. *LIPUTAN 6*. Diambil dari <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3945331/moeldoko-sebut-kekalahan-jokowi-di-jabar-dan-aceh-karena-serangan-isu-agama>, diakses 26 Agustus 2019
- Fajri, R. (2019). TKD Sebut Kekalahan Jokowi di Aceh Akibat Gencarnya Hoax. *AJNN*. Di <https://www.ajnn.net/news/tkd-sebut-kekalahan-jokowi-di-aceh-akibat-gencarnya-hoax/index.html>.

- Hall, S., & Du Gay, P. (Eds.). (2006). *Questions of Cultural Identity* (pp. pp-273). Crane Resource Centre.
- Hasyim. (2014). Prabowo-Hatta Menang Tipis di Aceh. *Serambinews.com*. Diambil dari <https://aceh.tribunnews.com/2014/07/19/prabowo-hatta-menang-tipis-di-aceh>, diakses 30 Agustus 2019
- Heller, A., dan Punsher, S. (1995). *Biopolitical Ideologies and Their Impact on the New Social Movements*. A New Handbook of Political Societies: Oxford, Blackwell.
- Lasswell, H. D. (1927). *Propaganda Technique in the World War*. Oxford: Knopf.
- Masriadi. (2019). Tim Jokowi Target Menang 70 Persen di Aceh. *KOMPAS.com*. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2019/01/22/16583701/tim-jokowi-target-menang-70-persen-di-aceh>, diakses 25 Agustus 2019
- Trumbull, M. & Watson, K. (2010). *Qualitative Research Method. Integrating Quantitative and Qualitative Methods in Research*, 3rd Ed. (pp.62-78). University Press of America, Inc.
- Ubed, A. S. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiater.
- Yin, R.K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press.